Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Daerah

Pelatihan Orientasi Eksekutif Senior, SCBD Kabupaten Klaten 23 Mei 2011

> Dr. Wahyudi Kumorotomo Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id kumoro@map.ugm.ac.id

081 328 488 444

Apa Manfaat Perencanaan dan "Dokumen Rencana"?

"Planning is everything. Plans are nothing." (Helmuth Graf von Moltke, 1914)
Tujuan perencanaan:

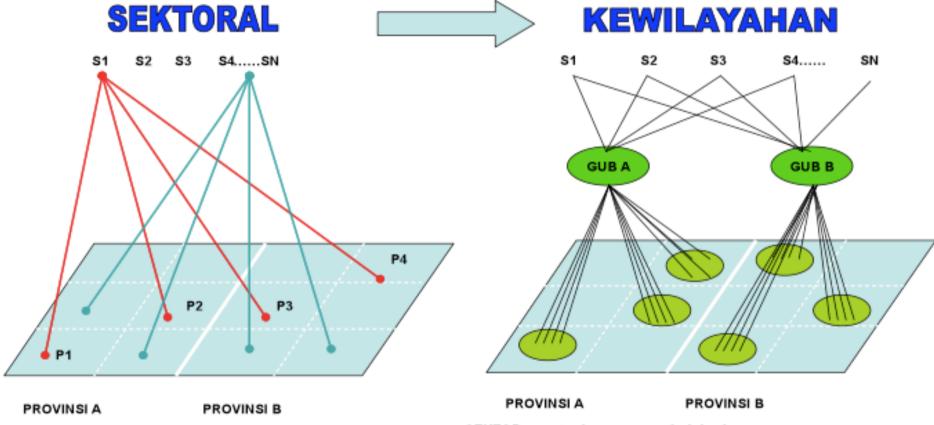
- 1.Mengurangi risiko
- 2. Mengurangi ketidakpastian
- 3. Mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik
- 4. Menciptakan kepercayaan (trust)
- 5. Menyampaikan informasi.
 - **Sebagai dokumen rencana, apakah RPJMD, RKP, Renstra dan Renja-SKPD dapat berfungsi dengan baik?

Tiga pilar pembangungan berkelanjutan (sustainable development) Human Rights Peace and human security Gender equality Economic: the production of goods and services · Cultural diversity & intercultural Social: the maintenance and enhancement of the SOCIAL understanding quality of life Health Environmental: the conservation and prudent Perspectives/ ♣IIV/AIDS management of natural resources Governance Natural resources (water, energy, agriculture, Poverty reduction biodiversity) Corporate responsibility and accountability Climate Change Sustainable Rural Development Market economy Sustainable urbanization Development Disaster prevention and mitigation **ECONOMIC** ENVIRONMENTAL Perspectives Perspectives

Sustainable Development:

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs ("Our Common Future", the World Commission on Environment and Development, 1997)

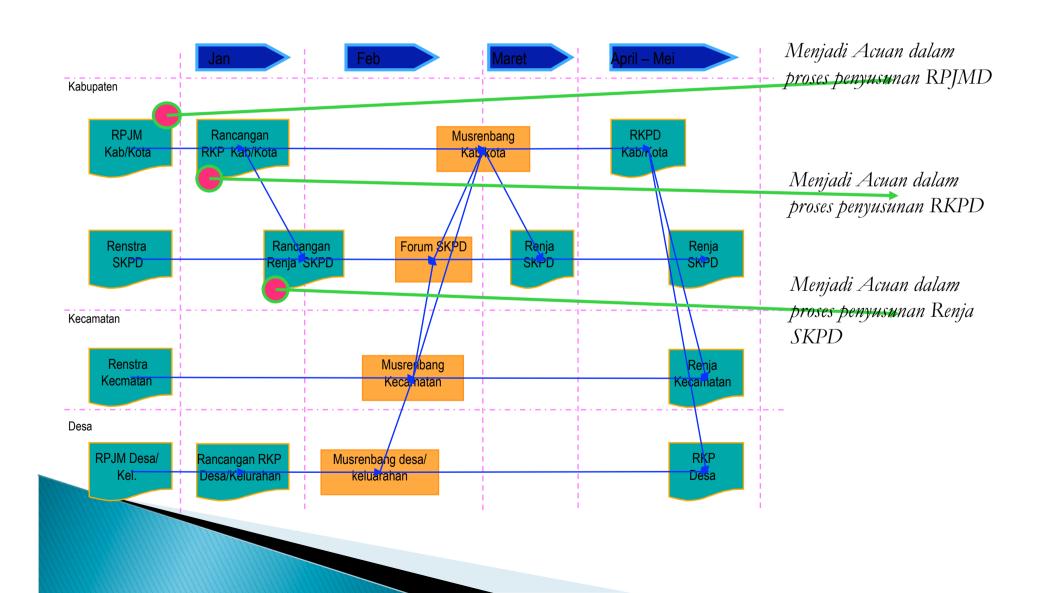
MANAJEMEN KEWILAYAHAN



 SEKTOR menetapkan s/d satuan 3 dg pilihan lokasi/kabupaten/kota Secara masing-masing TIDAK SINERGI

- SEKTOR menetapkan program & alokasi (satuan 2) beserta arahannya utk tiap2 provinsi
- Gubernur diberikan kewenangan menetapkan satuan 3 dg pilihan lokasinya SINERGI antar sektor, antar daerah, & fokus

Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah



Kaitan antar Dokumen Rencana

			Rencana Tindak													
No	Pe masalahan Dasar	Strategi	lvestasi		Waktu			/		Non Investori		Waktu		Instansi		
						_	=	Ш	ı /		Non Investasi		I	=	Ξ	
I	KESEHATAN			/												
	Pengadaan sarana dir bersih khususnya di daerah terpencil di wilayah pegununga dan pesisir yang benyak penduduknya masih sangat kuran j	Optimalisasi pengelolaan bendungan/waduk, menjadi sumber air bersih		Pembangunan sarana penampungan air bersih (l dan PAB) di sentra pemuki masyarakat miskin	IAH rian						Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat					Dinas PUD dan Kantor PDAM
		Identifikasi sumber air yang bisa dikelola sebagai sumber air bersih		Pembangunan proyek perpipaan ke lokasi pemukiman penduduk mis	kin						/					
			4	Penyediaan hydran umum Penambahan sarani mobil tangki												
	yang buruk karena	Menciptakan Senjukiman kebanga ni kin yang sehat	1 Rehabilitasi dan penataan rumah layak huni					1	V	Studi pemetaan wilaya miskin yang sangat membutuhkan MCK Umum	ah				Din Kes – PDAM	
		$\bigvee\bigvee\bigvee$						Koordinasi dengai PDAM untuk menempatkan tempai penanmpungai air belsih	t							
									3		Studi desain penataar SPAL divlingkungan miskin	1				

RP PD

RPUMD

RKPD

RENJA SKPD

Isu Strategis

- Koordinasi antar instansi dan sinergi kelembagaan
- 2. Partisipasi masyarakat
- 3. Pemenuhan kebutuhan dasar
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar
- 5. Diversifikasi ekonomi (di luar sektor pertanian)
- Pengembangan sosial-budaya, penunjang pariwisata
- 7. Lingkungan hidup dan konservasi SDA.

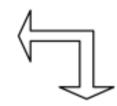
Misi Pembangunan Daerah dari Berbagai Perspektif

MISI PEMBANGUNAN DAERAH



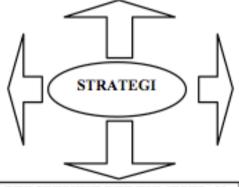
PERSPEKTIF STAKEHOLDER

- SIAPA KONSUMEN KITA, BAGAIMANA DEFINISINYA?
- BAGAIMANA KITA MENCIPTAKAN NILAI(value) BAGI KONSUMEN?
- APAKAH KONSUMEN MENDAPATKAN PELAYANAN YG DIBUTUHKAN?



PERSPEKTIF KEUANGAN

- BAGAIMANA KITA MENAMBAH NILAI BAGI KONSUMEN SAMBIL TETAP MENGONTROL ANGGARAN BIAYA?
- APAKAH KITA
 BERKELANJUTAN
 SECARA KEUANGAN?

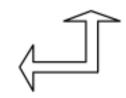


PERSPEKTIF PERTUMBUHAN

 BAGAIMANA KITA MEMBERDAYAKAN DIRI UNTUK TUMBUH & KEMBANG BERKELANJUTAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN KEBUTUHAN KONSUMEN YG TERUS MENINGKAT?

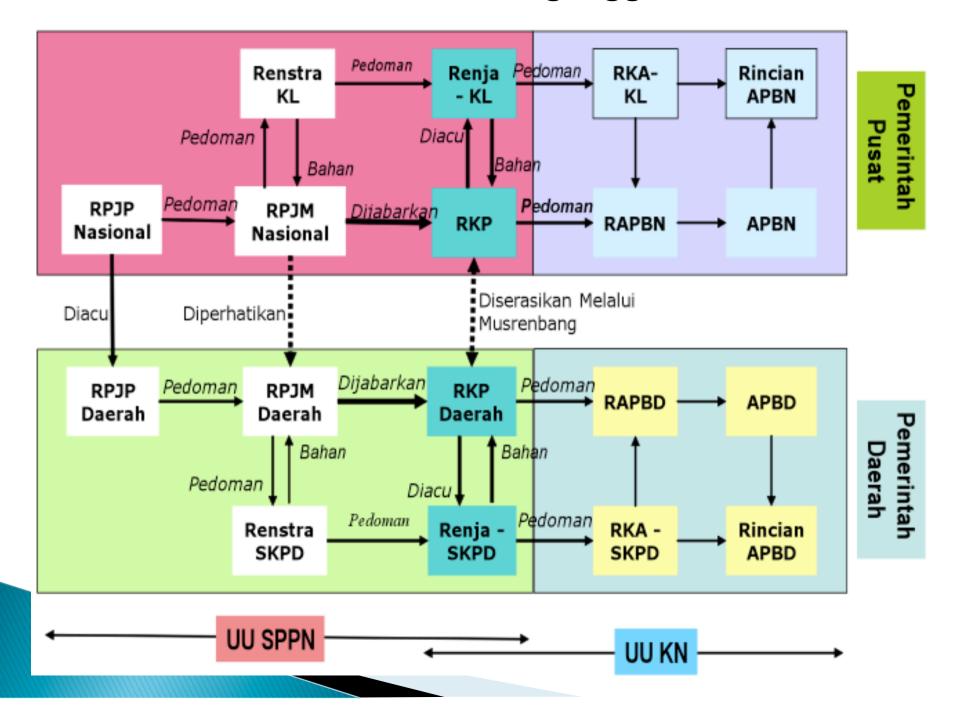


BAGAIMANA
MEMENUHI TUNTUTAN
KONSUMEN DENGAN
BATASAN ANGGARAN,
INTERNALITAS APA
YANG HARUS
DITINGKATKAN?,
STRUKTUR
ORGANISASI?, PROSES?,
PROSEDUR?





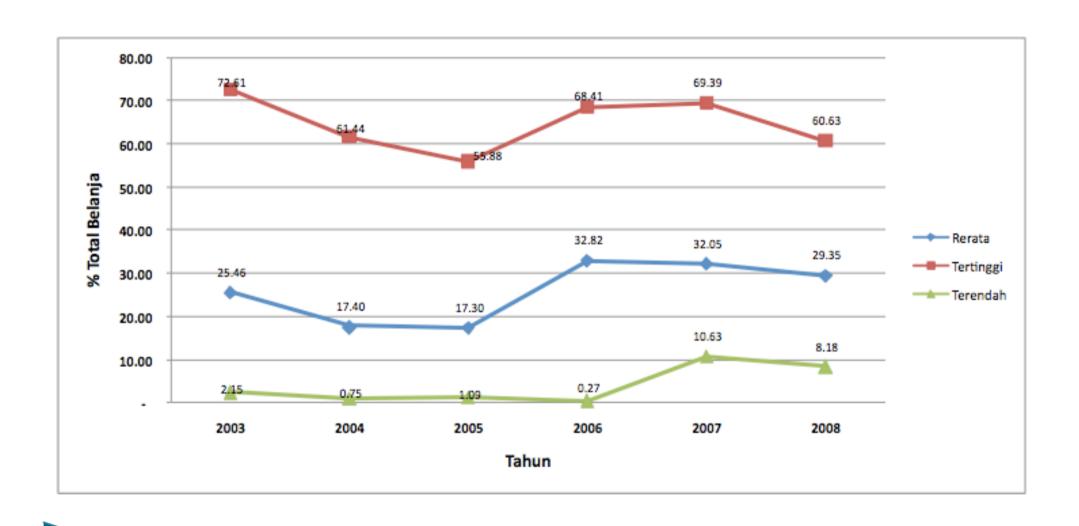
Perencanaan dan Penganggaran



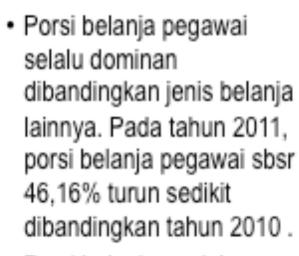
Korelasi antara Pendapatan, Belanja dan PDRB tahun 2003-2007

PARAMETER	PDRB 03	PDRB 04	PDRB 05	PDRB 06	PDRB 07
Pendapatan 03	0,093	0,238	0,22		
Belanja 03	0,125	0,241	0,234		
Pendapatan 04		0,243	0,232	0,248	
Belanja 04		0,240	0,228	0,246	
Pendapatan 05			0,304	0,322	0,33
Belanja 05			0,284	0,302	0,281
Pendapatan 06				0,340	0,349
Belanja 06				0,276	0,264

Proporsi Belanja Modal dalam APBD Kab/Kota

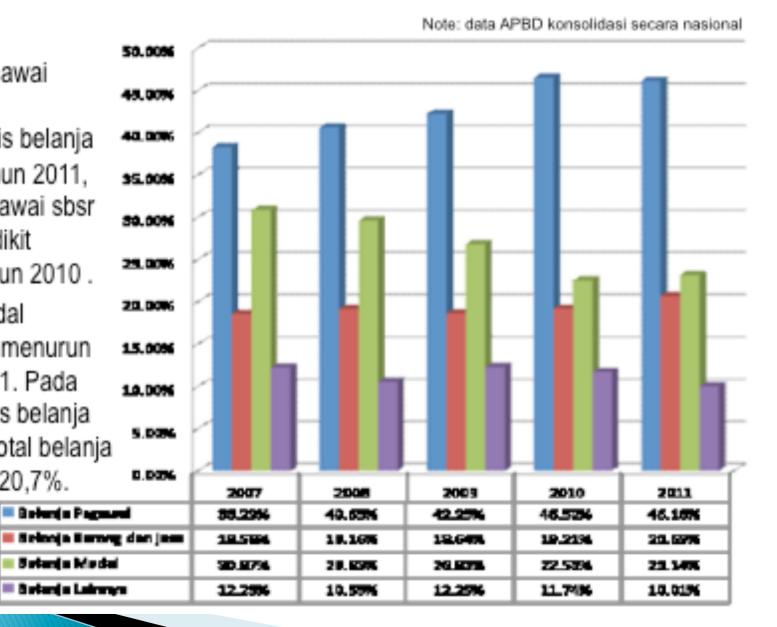


Trend Komposisi Belanja Daerah

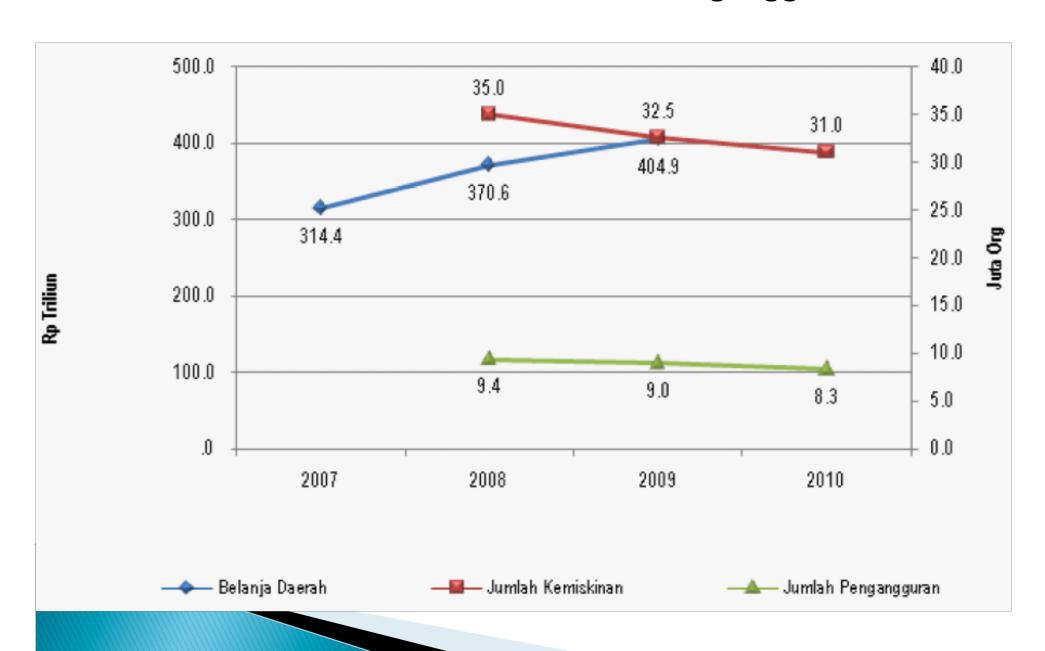


 Porsi belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsis belanja modal terhadap total belanja hanya mencapai 20,7%.

Setanja Medal



Apa Relevansi Belanja Modal Daerah dg Kemakmuran Rakyat? Data Faktual: Kemiskinan dan Pengangguran



Percepatan Penyampaian APBD (PMK No. 65 Tahun 2010)



APBD Kab Klaten 2010

	Uraian	Jumlah	% Total
		(jutaan rupiah)	Belanja APBD
Total Pendapatan		1.025.517	
	Pendapatan Asli Daerah	71.372	6,93
	Dana Perimbangan	843.372	81,96
	Lain-lain Pendapatan	31.400	
Total Belanja		1.028.963	100,00
Belanja Tidak L	angsung	907.426	88,19
	Belanja pegawai	760.987	73,96
	Hibah	72.487	
	Bantuan sosial	37.136	3,61
	Bagi hasil	544	
	Bantuan keuangan	34.067	
	Belanja tidak terduga	1.203	
Belanja Langsu	ing	121.536	11,81
	Belanja pegawai	12.123	1,18
	Belanja barang & jasa	80.691	7,84
	Belanja modal	28.723	2,79
Pembiayaan Daerah (netto)		3.445	
	SiLPA	27.500	
	Dongolyaran	32 500	

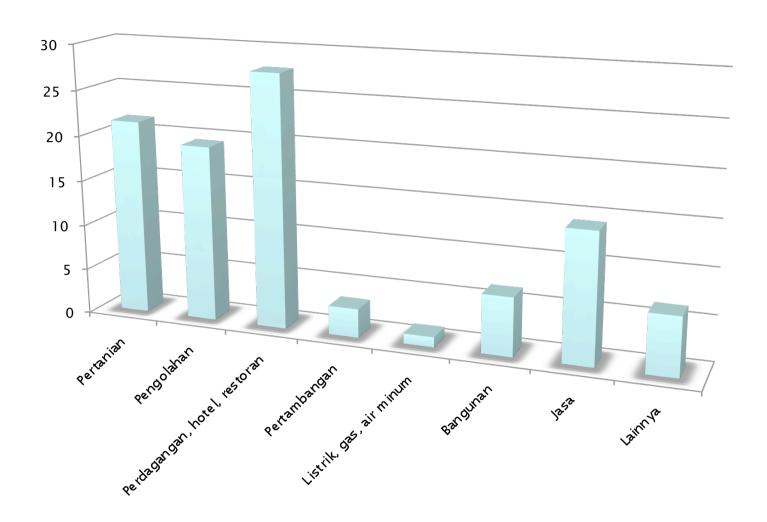
Tantangan Belanja Tidak Langsung

- 1. Kenaikan gaji PNS 10%
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (Jumlah pegawai Kab Klaten: sekitar 17.000. Sudah proporsional dg jumlah penduduk yang 1,3 juta jiwa?)
- 3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Tengah
- 4. Kenaikan Alokasi Dana Desa

Belanja APBD Kab Klaten 2008 Menurut Sektor

No.	Sektor / Fungsi	Belanja (Rp juta)	%		
1	Pendidikan	500.892	48,76		
2	Layanan umum / pemerintahan	227.536	22,15		
3	Perumahan / fasilitas umum	179.586	17,48		
4	Kesehatan	43.522	5,10		
5	Ekonomi	38.867	3,59		
6	Ketertiban dan keamanan	6.860	0,67		
7	Perlindungan sosial	6.620	0,64		
8	Pariwisata dan budaya	3.804	0,37		
9	Lingkungan hidup	1.589	0,16		
	Jumlah	1.027.364	100,00		

Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Klaten 2009



Rencana Program & Kegiatan Th 2008

- > Jumlah Program: 258
- > Jumlah Kegiatan: 1.325
- Jumlah Pagu Belanja (Dana APBD) Tersedia: Rp 923.014.243.000
- Jumlah Usulan Dana APBD Kabupaten: Rp 1.027.364.761.000
- Kelebihan dana usulan belanja APBD dengan Pagu Indikatif: Rp 104.350.518.000
- > Jumlah Usulan Dana Rencana Program dan Kegiatan Th 2008: Rp 452.245.881.000.

Catatan: Apakah semua program/keg sudah responsif dengan prioritas dan kebutuhan rakyat?

Semua rakyat di Kab Klaten menanti apakah rencana pembangunan daerah dan APBD benar-benar bisa membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

TERIMA KASIH